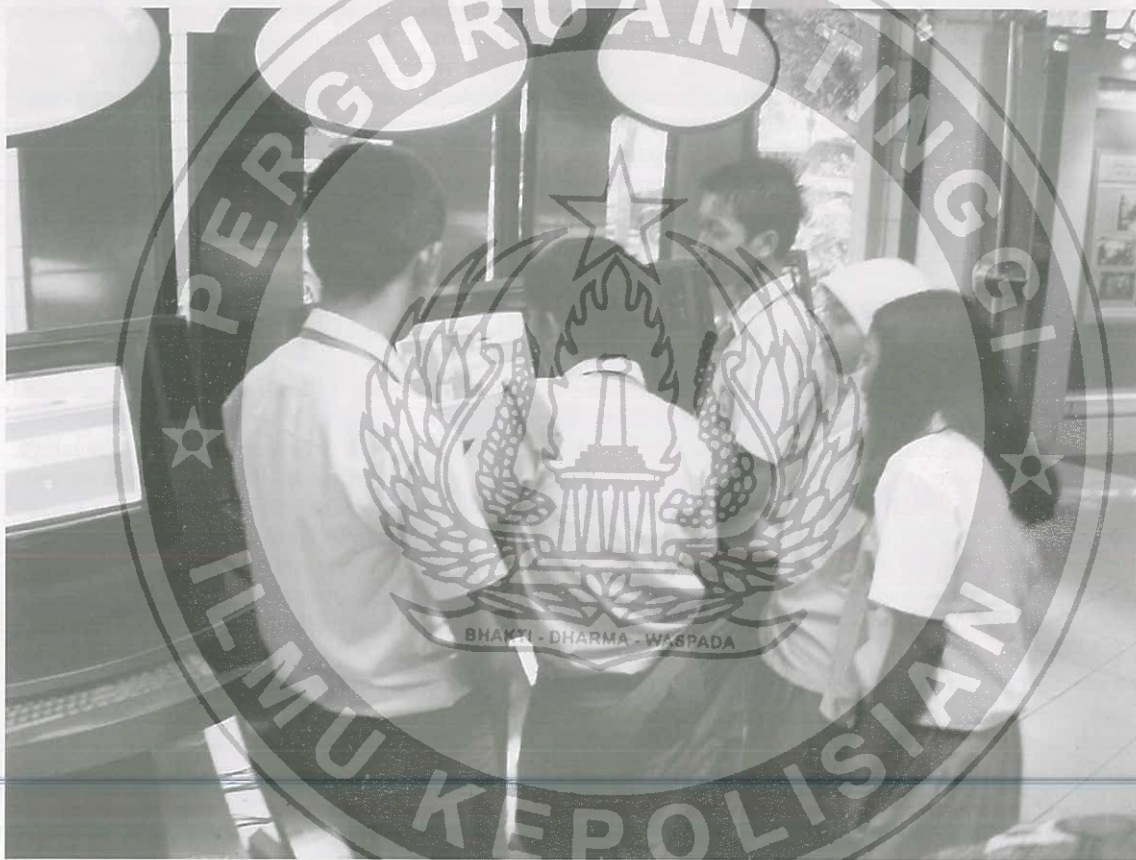


Alternatif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Keberdayaan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan

Penulis:
Imam Prakoso



Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memainkan banyak peran penting dalam kehidupan manusia, dalam politik, kehidupan ekonomi, juga dalam pengembangan sosial dan budaya. TIK telah secara cepat mentransformasi kehidupan manusia, dalam urusan bisnis, akses kepada informasi dan layanan,

komunikasi dan interaksi, bahkan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penghibur. Ibarat pisau, TIK sangat bergantung pada pemiliknya akan digunakan untuk kepentingan dia digunakan.

Salah satu isu utama dalam TIK yang juga punya relevansi kuat dengan isu kemiskinan adalah kesenjangan digital (*digital divide*). Kesenjangan digital diyakini merupakan

kesenjangan dalam hal akses kepada TIK, baik pada soal teknologinya, infrastruktur komunikasi, maupun informasinya itu sendiri. Kesenjangan ini dapat diidentifikasi terjadi pada skala global, region, sub-region, antar wilayah dalam negara, dalam konteks satu wilayah tertentu dengan wilayah lainnya atau bahkan dalam rumah tangga sekalipun. Dampak dari kesenjangan digital ini membuat ke-

senjangan antara wilayah satu dengan lainnya semakin lebar jurang yang terjadi.

Tanggapan atas kesenjangan digital ini beragam. Salah satu pandangan mengenai kesenjangan ini meresponnya melalui pengembangan TIK ke wilayah-wilayah yang selama ini dianggap kurang berkembang (*less developed*) yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan tersebut. Pandangan lain merespon sedikit berhati-hati dalam memberikan tanggapan, karena TIK dianggap sebagai alat kaum kapitalis untuk melakukan penetrasi global. Namun pandangan lain yang lebih berada di antaranya mengatakan TIK akan dapat mengurangi kemiskinan dan tidak menjadi alat kekuatan global dalam melakukan penetrasi pada negara-negara berkembang asalkan didukung dengan kebijakan yang tepat dan pendekatan yang holistik dan bersifat *cross cutting*.

Kesenjangan digital jika diamati dalam konteks global, misalnya, dapat dilihat pada tingkat penetrasi internet. Data menunjukkan telah terjadi kesenjangan digital antar region. Timur Tengah – misalnya – merupakan wilayah dengan penetrasi internet tersedikit yang selanjutnya diikuti oleh Afrika. Sedang region dengan penetrasi tinggi adalah Amerika Utara lalu menyusul wilayah Eropa. Di dalam konteks sub-region juga terjadi kesenjangan digital yang sama juga. Di Asia Tenggara misalnya, negara dengan indikator pengguna ICT yang tinggi ternyata juga adalah negara dengan *Human Development Index* (HDI) tinggi pula. Sebaliknya, negara dengan pengguna TIK yang rendah,

ternyata juga menduduki posisi *Human Poverty Index* (HPI) yang tinggi. Dengan demikian dapat disebutkan di sini bahwa semakin lebar kesenjangan digital suatu region, sub-region ataupun wilayah, maka disparitas antar wilayah tersebut semakin tinggi, dan ini mendorong meningkatnya angka kemiskinan di suatu wilayah secara makro.

Respon terhadap kesenjangan digital dalam salah satu versi yang dijelaskan di atas disebabkan adanya kepentingan modal (*capital investment*). Biasanya hal ini terjadi karena ada wilayah yang *less-economic attractive* dibanding wilayah lainnya yang memiliki *economic attractiveness* yang tinggi. Itulah sebabnya banyak kalangan berpendapat kesenjangan digital dapat terjadi sebagai akibat logika ekonomi dan pasar yang bermain. Sebagai contoh saat ini 60 persen warung internet tersebar di pulau Jawa dan Bali, yang nota bene hanya kurang dari 20 persen wilayah Indonesia. Sementara 40 persen lainnya tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara dan Papua yang dari sisi wilayah luasnya mencapai sekitar 80 persen dari luas Indonesia. Akibatnya dapat diduga, kantong-kantong kemiskinan dan daerah miskin banyak terdapat di 80 persen wilayah Indonesia tersebut. Kesenjangan digital ikut menyumbang terjadinya disparitas antar wilayah tadi.

Kemiskinan dalam pandangan beberapa ahli dan juga lembaga internasional seperti World Bank dan Asian Development Bank disebabkan oleh terjadinya kesenjangan atas aset-aset yang esensial seperti sumberdaya yang produktif dan kapital, situasi atau posisi sebagai tenaga kerja yang tidak aman, pendapatan yang hanya didapat secara musiman, tinggal di tempat kumuh, atau tinggal di daerah dimana sumberdayanya miskin, pendapatan yang rendah, kualitas hunian yang buruk, kualitas pendidikan yang rendah, dan juga adanya diskriminasi. Selebihnya, kemiskinan juga dipe-

ngaruhi oleh layanan pemerintah yang buruk serta korupsi yang disebabkan oleh rendahnya *political will* pemerintah, tata kelola pemerintahan yang buruk, ketidaktepatan kebijakan dan program publik. Dengan demikian kemiskinan menjadi persoalan sosial ekonomi yang multi kompleks yang juga harus ditangani melalui berbagai dimensi dan pendekatan.

Apakah pemanfaatan TIK dapat mengurangi kemiskinan? Pemanfaatan TIK dapat meningkatkan produktivitas kelompok miskin. Misalnya melalui peningkatan akses mereka kepada informasi pasar atau justru menurunkan (efisiensi) biaya transaksi dari petani dan pengusaha miskin. Dengan TIK mereka dapat mengurangi jenjang informasi pasar dan justru dapat memasarkan produk mereka secara langsung kepada pembeli utama di pasar dunia. Namun secara tidak langsung TIK dapat berperan mengurangi potensi kemiskinan dengan perbaikan terhadap layanan pendidikan, perbaikan kualitas layanan kesehatan, perbaikan kondisi *governance* dan sebagainya. Intervensi ini dapat memperbaiki lingkungan yang mendorong kondusivitas lingkungan bisnis kelompok masyarakat miskin, misalnya dengan menurunnnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh penduduk miskin.

Bagaimana dengan pengalaman di Indonesia? Kemiskinan yang terjadi di Indonesia sedikit banyak disebabkan oleh terjadinya disparitas pembangunan yang terjadi di Jawa dan luar Jawa, wilayah Barat dan Timur, perkotaan dan perdesaan maupun berbagai alasan yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas. Perkembangan TIK sendiri berjalan sesuai dengan logika ekonomi yang ada, dimana ada pasar TIK berkembang mengikutinya.

Persoalan sosial ekonomi yang multi kompleks menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia tak pernah beranjak dari kisaran 40-an juta jiwa. Meskipun telah banyak kita lihat bagaimana program-program pe-

nanggulangan kemiskinan dijalankan. Baik yang memiliki pendekatan pemberdayaan, berskala masal dan berbasis area perkotaan, seperti P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang berbasis perdesaan, maupun yang bekerja pada orientasi sektor. Ataupun yang bersifat karitatif seperti PKH (Program Keluarga Harapan). Intervensi dalam program-program masal tersebut

di atas terutama pada akses modal, pengorganisasian usaha, peningkatan kapasitas berusaha, pengembangan infrastruktur lokal, dan perbaikan hunian.

Jika kembali pada tanggapan atas kesenjangan digital, akibat dampak globalisasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di satu sisi, juga menyebabkan semakin tingginya disparita di sisi yang lain. Kondisi ini pada gilirannya semakin mempercepat proses peningkatan kemiskinan dari kondisi sebelumnya. Perdebatan antar aras tanggapan di atas dalam

kenyataan tak dapat membawa negara dalam posisi yang lebih baik, sehingga langkah yang dilakukan adalah upaya-upaya mengurangi kesenjangan digital dengan kebijakan yang tepat yang disertai dengan pendekatan secara holistik seperti telah diutarakan pula di atas. Apakah mengurangi kesenjangan digital melalui pengembangan TIK dan akses informasi pada wilayah-wilayah yang less-developed dapat menjadi obat mujarab mengurangi tingkat kemiskinan?

Inisiatif dan Proyek TIK oleh Pemerintah, Sek- tor Swasta dan Masyarakat Sipil

Indonesia memiliki berbagai pengalaman dalam pengembangan TIK yang diorientasikan pada upaya pengurangan kemiskinan maupun berbagai kepentingan lainnya. Salah satu pendorong kesediaan Indonesia untuk memperluas pemanfaatan TIK di wilayah-wilayah marginal, karena keikutsertaan dan komitmennya dalam WSIS (*World Summit on Information Society*) di Genewa Desember 2003 yang berharap bahwa target seluruh desa mendapatkan akses TIK dan komunikasi pada tahun 2015 dapat tercapai.

Inisiatif pengembangan -- entah dalam konteks upaya mengurangi kesenjangan digital akibat tidak meratanya akses komunikasi di desa-desa di Indonesia atau konteks yang lain, Pemerintah telah menjalankan pengembangan TIK di wilayah-wilayah perdesaan Indonesia yang bersifat ujicoba pada tahun 2003 yang lalu. Salah satu yang dikembangkan adalah program Desa Berdering. Program ini menargetkan sekitar 3.000 desa tersambung telepon yang menggunakan teknologi satelit. PT PSN (Pasifik Satelit Nusantara) yang menjadi operator pengembangan program yang memanfaatkan program USO (*Universal Service Obligation*) ini memberikan hasil yang tak menggembirakan. Paska pulsa gratis yang diberikan, telepon yang kebanyakan ditempatkan pada kan-

tor Kepala Desa (dan sebagian lagi di rumah kepala desa) tak berlanjut alias mati suri. Telepon tak lagi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Meskipun tak pernah disebut gagal, program Desa Berdering ini tak pernah memberikan hasil yang memuaskan. Adakah yang salah? Ketidakberhasilannya menurut Ryan Alisyahbana, Direktur PT PSN pada waktu itu, disebabkan oleh berbagai persoalan non-teknis.

Setelah program Desa Berdering, program USO akan ditingkatkan menjadi Desa Pinter. Tak hanya sarana telepon yang akan dipasang dalam desa, namun juga disertai dengan akses internet dan perangkat multimedia lainnya. Dalam program ini paket perangkat komunikasi dan informasi yang dibawa dikenal dengan sebutan *Community Access Point (CAP)*. Program yang direncanakan mulai dijalankan tahun 2008 ini belum berhasil diimplementasikan karena persoalan teknis administrasi tender yang masih tersendat. Pertanyaan besarnya apakah program masal ini akan mencapai targetnya di tahun 2015 nanti dimana semua desa tersambung dengan akses komunikasi maupun TIK? Apakah tidak akan mubazir juga seperti halnya program Desa Berdering sebelumnya.

Inisiatif lain yang banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok organisasi seperti Mastel (Masyara-



kat Telekomunikasi) misalnya dengan mendirikan Balai Informasi Masyarakat untuk pengembangan usaha petani bunga di Bandung, Jawa Barat. Atau misalnya inisiatif yang dijalankan oleh Microsoft Corporation melalui pengembangan CTLC (*Community Learning and Training Center*) di hampir 50 lokasi tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. UNDP dan Bappenas bekerjasama melalui proyek PePP (*Partnership for e-Prosperity for the Poor*) mendirikan pilot pengembangan telecenter di paling tidak delapan lokasi di Jawa dan Sulawesi. Pola yang dikembangkan satu sama lain memiliki kemiripan. Proyek menyediakan berbagai perangkat multimedia, akses internet dan gedung untuk operasionalisasi. Pada tahun 2005 yang lalu, World Bank melakukan evaluasi perjalanan terhadap inisiatif yang dikembangkan di atas. Sebagian dari inisiatif di atas dikembangkan melalui pendekatan *community-driven development*. Namun sebagian besar investasi disediakan secara penuh oleh Pemerintah, Donor ataupun Perusahaan dan proses persiapannya tak melibatkan warga setempat. Hal lain telecenter dijalankan tanpa konsep rencana usaha yang jelas, padahal sarana ini dikembangkan untuk dapat dikelola secara mandiri nantinya sete-

lah dukungan proyek berhenti. Jelas hal ini akan berdampak pada terganggunya aspek keberlanjutannya. Belum lagi, evaluasi ini melihat kapasitas pengelola yang minim,

sehingga ada kekuatiran terjadinya *miss leading*. Namun demikian, beberapa telecenter yang dikembangkan oleh UNDP dan Bappenas hingga saat ini masih tetap berdiri dan beroperasi. Bahkan beberapa petani/usaha kecil di sana telah dapat memasarkan produknya melalui jasa telecenter ini. Terkesan dalam pengembangan telecenter ini teknologi yang digunakan tak dapat merespon kebutuhan rakyat dalam konteks isi, skill, desain maupun harga (biaya) yang harus dibankan kepada mereka.

Inisiatif lain yang dikembangkan terkait penyediaan akses internet kepada masyarakat dilakukan melalui wadah radio komunitas. Awalnya penyediaan akses internet diperuntukkan bagi pertukaran informasi dan berita antar media komunitas. Namun beberapa radio komunitas kemudian melakukan inisiatif-inisiatif untuk memanfaatkan akses internet bagi kepentingan lain. Radio Baina FM yang berlokasi di kaki gunung Ceremai, Kabupaten Kuningan mencari berbagai informasi dan pengetahuan bagi kebutuhan usaha tani warganya melalui internet yang kemudian disiarkan oleh radio. Radio Komunitas Lintas Merapi di kecamatan Kemalang, Klaten Jawa Tengah mengupayakan pengumpulan dana dukungan bagi proses penghijauan di desanya melalui dialog interaktif di situs <http://merapi.combine.or.id> sehingga akhirnya terkumpul dana dari berbagai kalangan untuk penanaman kembali pohon-pohon perindang setelah sebagian tersapu gelombang awan

panas sewaktu gunung Merapi meradang di bulan Mei dan Juni 2006 yang lalu. Tak hanya itu, Radio Caraka FM, di Majalengka, Jawa Barat mengorganisir diri mengembangkan lembaga keuangan mikro untuk mendukung usaha mikro di desa tempat berdirinya radio. Lembaga keuangan ini kemudian didukung oleh penyediaan akses internet untuk mengumpulkan informasi bagi kebutuhan pengembangan usaha mikro. Masih banyak lagi inisiatif serupa yang dikembangkan oleh radio komunitas di berbagai daerah. Bagaimana akses internet tersedia? Prasarana yang dikembangkan sangat sederhana. Berbekal modem USB (atau bahkan seperangkat telepon selular yang memiliki fasilitas teknologi GPRS) yang dihubungkan ke komputer dengan mudahnya akses internet terhubung. Combine dan VHR menyediakan sebagian peralatan modem (sebagian lagi disediakan sendiri oleh warga) dan akses internet yang disediakan oleh provider telepon selular yang menggunakan teknologi GPRS hanya untuk periode 3 – 6 bulan. Setelah itu, radio diminta untuk membiayai sendiri.

Membangun kemandirian "telecenter" versi radio komunitas ini penting sekali. Karena bagaimanapun pihak luar (apakah itu donor, Pemerintah ataupun LSM) tak dapat selamanya membiayai operasional internet tersebut. Pada kasus telecenter yang diprakarsai oleh UNDP dan Bappenas beberapa diantaranya berhenti beroperasi paska proyek selesai. Ditengarai tidak tersedianya dukungan pendanaan bagi operasionalisasi kantor telecenter sendiri. Tentu saja kemudian persoalan mengarah pada tidak terjadinya proses membangun kemandirian dan sustainability, sehingga setelah proyek selesai biaya operasional tak dapat dipenuhi dan akhirnya telecenter tersebut memilih untuk tutup. Sebaliknya, pada kasus radio komunitas, setelah kegiatan berjalan lebih dari satu – dua tahun, akses internet yang tersambung tetap beroperasi. Bahkan layanan

yang diberikan oleh radio komunitas semakin bervariasi. Pada kasus radio Shakti FM di Banjarnegara, Jawa Tengah mereka berinisiatif memberi pelatihan pada guru-guru di sekolah menengah kecamatan tersebut dalam pengenalan internet. Radio komunitas Lintas Merapi FM di lereng gunung Merapi Klaten mengadakan pelatihan komputer bagi perangkat desa di seluruh wilayah kecamatan Kemalang, Klaten. Ide kegiatan variatif semacam itu didasarkan pada keinginan memperluas pengguna internet di kalangan masyarakat desa. Ada pemahaman yang terbangun di kalangan pengelola radio, bahwa rakyat akan bersedia terlibat (termasuk ikut membiayainya) jika mereka tahu apa keuntungannya ketika mereka menjelajah di dunia maya. Dalam pelatihan, mereka dikenalkan dan diberi pengalaman menggunakan dan memanfaatkan internet, sehingga kemudian pada saat mengetahui arti pentingnya menjelajah di dunia maya, yang terjadi kemudian mereka akan semakin haus untuk melakukan itu.

Jika dibandingkan dari sisi pembiayaan akses internet memang sangat jauh berbeda. Beberapa proyek telecenter yang dibiayai UNDP dan Bappenas mengaku sebulan membutuhkan biaya lima juta rupiah untuk akses internet, karena menggunakan teknologi V-sat dari TELKOM. CTLC Microsoft Corporation sendiri membutuhkan sekitar satu juta rupiah per bulannya untuk akses internetnya. Sementara itu, masing-masing radio komunitas hanya membutuhkan biaya 150 – 250 ribu rupiah per bulannya, karena hanya menggunakan akses internet

dengan teknologi GPRS (*General Packet Radio Service*). Tentu jika ingin dibandingkan bandwidth yang diterima diantara ketiganya sangat jauh berbeda. Namun apakah kebutuhan untuk mengakses internet sedemikian tinggi sehingga biaya yang diperlukan sangat besar – seperti pada kasus telecenter? Beberapa pengelola radio komunitas memang mengaku terkadang sulit untuk melakukan upload berita atau informasi dengan akses GPRS, namun mereka berpikir akses ini jauh lebih baik ketimbang tidak ada dan selama mereka belum mampu membiayai akses internet yang lebih cepat tak pernah berpikir untuk meningkatkan kapasitas akses tersebut. Cerita di Caraka FM lain lagi. Hanya berselang 3 bulan paska didukung oleh akses internet melalui teknologi GPRS mereka ingin mengusahakan sendiri akses yang lebih cepat, meskipun harus membayar biaya operasi lebih mahal.

Pengalaman yang dikembangkan oleh Radio Komunitas Angkringan FM di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Bantul DIY agak berbeda dengan radio yang lain. Meskipun mereka mendapat akses internet yang sama seperti radio lainnya, namun karena adanya keinginan untuk berbagi dengan warga – serta membangun *sustainability* -- yang membutuhkan akses tersebut, mereka mencoba mengembangkan jaringan internet tersebut agar dapat didistribusikan kepada rumah tangga, pengusaha mikro, pengrajin yang berada di sekitar radio. Dengan memanfaatkan teknologi wajan bolic ala "Ono Purbo", radio ditempatkan menjadi local server dan mendistribusikan akses internet (maupun intranet) kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Saat ini ada 13 titik yang terhubung dengan local server tersebut, antara lain, pengrajin, rumah tangga, pesantren dan sebagainya. Mereka melakukan cicilan untuk mendapatkan infrastruktur wajan bolic seharga antara 350 sampai 700 ribu rupiah. Dana cicilan tersebut kemudian menjadi dana ber-

gulir untuk kepentingan akses internet oleh keluarga yang lain. Potensi pelanggannya cukup besar. Berdasarkan survey yang dilakukan, ada sekitar lebih dari 140 pengguna komputer di desa Timbulharjo. Tak hanya itu, Radio Angkringan FM juga merencanakan pengelolaan informasi untuk memastikan kebutuhan konten masing-masing pelanggan terpenuhi melalui local server. Proyek yang diinisiasi pengelola radio ini mendapat dukungan sekitar 30 juta rupiah dari Direktorat Pemberdayaan Telematika, Ditjen Aptel, Depkominfo. Bagaimana sistem ini akan terjaga keberlanjutannya? Masing-masing pelanggan akan membayar biaya yang kemudian dikelola oleh radio untuk pengelolaan sistem, termasuk membayar akses internet itu sendiri. Sistem informasi Desa Timbulharjo ini masih akan terus dikembangkan, dan semakin lama, diharapkan dapat memberi layanan bagi warga dalam hal kebutuhan informasi.

Internet tak hanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar pengelola radio, usaha mikro, pengrajin di dalam menjelajah dunia maya untuk menemukan data dan informasi yang dibutuhkan ataupun menawarkan dagangannya lewat website. Pengalaman sedikit berbeda dilakukan oleh Organisasi Petani di Jawa Tengah (Syarikat Paguyuban Petani Qaryah Tayyibah atau sering disingkat dengan nama SPPQT) di dalam memfasilitasi berdirinya SMP terbuka. SMP ini memanfaatkan internet sebagai bagian dari model pembelajarannya. Kasus ini menarik juga diangkat. Rata-rata murid SMP tersebut sulit untuk duduk di bangku SMP normal. Selain soal dana, jarak rumah dan sekolah yang jauh – yang membutuhkan ongkos tak sedikit – juga menjadi kendala mereka untuk masuk di SMP normal. Bahruddin, pemuda pelopor di desa Kalibening, Salatiga, Jawa Tengah, tempat pilot SMP terbuka pertama didirikan menganggap penting membuka wawasan murid, tanpa harus dibatasi oleh kuriku-

lum semata. Hampir setiap hari murid sekolah tersebut menjelajah dunia maya untuk mendapat bahan-bahan pengetahuan bagi kepentingan belajarnya. Metode diskusi diperkenalkan dalam proses belajar mengajar di sana. Durasi menjelajah dunia maya di sekolah ini jauh lebih lama

dari sisi waktu dibanding SMP biasa. Tak hanya dalam mata pelajaran multimedia, hampir semua mata pelajaran murid-murid memanfaatkan internet untuk melengkapi pengetahuannya. Longgarnya waktu untuk menjelajah disertai dengan kebebasan berpikir yang dibangun semenjak awal membuat kreativitas mereka terbangun dengan sangat cepat. Bahkan kreativitas mereka kemudian banyak tersalur dengan menulis dalam bentuk novel-novel sederhana yang telah masuk percetakan dan didistribusikan. Kini SMP terbuka milik SPPQT (Syarikat Paguyuban Qaryah Toyyibah) telah menjadi 6 unit tersebar di situs organisasi di berbagai kabupaten di Jawa Tengah.

Pemberdayaan Rakyat, Informasi dan Komunikasi



Penting digarisbawahi upaya penguatan rakyat dengan menempatkan pemberdayaan pada posisi yang benar dan bukan hanya dijadikan jargon semata, sementara disisi lain, esensinya sangat berorientasi pada kepentingan proyek atau target-target kuantitatif semata. Esensi pemberdayaan seperti banyak disebut dalam literatur antara lain adalah: (1) perluasan kemampuan dan pilihan masyarakat; kemampuan untuk menerapkan pilihan berdasarkan kondisi yang bebas dari kelaparan, kedinginan, dan kekurangan; kesempatan untuk berpartisipasi dalam, atau memberikan persetujuan atas, proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Atau juga merujuk definisi yang lain: pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk: (a) memiliki akses terhadap sumber daya (produktif) yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Parson, et al., 1994:106). Pendek kata, pemberdayaan adalah

upaya untuk mensejajarkan peran rakyat (didalam konteks pembangunan) seimbang dengan peran-peran pemangku kepentingan lain dalam upaya untuk mensejahterakan dirinya. Ketika peran serta posisi rakyat sejajar (dalam posisi tawar) dengan pihak-pihak lain, maka dia dapat juga ikut menentukan apa yang terbaik untuknya. Konteks masyarakat seperti inilah kemudian dapat ditempatkan sebagai rakyat yang berdaya.

Menempatkan konteks pemberdayaan rakyat pada pengembangan TIK itu sendiri dapat dirunut melalui pandangan Phil Bartle, sosiolog Amerika yang sempat menetap cukup lama di Afrika menyebut paling tidak ada 16 elemen yang menunjukkan keberdayaan suatu komunitas. Dua dari 16 elemen yang disebutkan Bartle akan menjadi fokus dalam tulisan ini yakni Komunikasi dan Informasi. Elemen Informasi dapat terwujud ketika rakyat memiliki kemampuan untuk mengakses, mengolah, dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan kepentingan mereka. Sementara elemen Komunikasi dapat terwujud manakala terbukanya akses rakyat pada jaringan komunikasi (baik elektronik, misalnya: telepon, radio, televisi, internet, maupun cetak, misalnya: koran, majalah dan buletin).

Kedua elemen ini masing-masing saling berhubungan satu dengan lainnya. Dengan mendapatkan akses terhadap jaringan komunikasi, maka rakyat akan mendapatkan berbagai macam informasi. Semakin banyak

akses terhadap berbagai jenis media, maka semakin banyak pilihan terhadap informasi yang mereka butuhkan. Dengan keberadaan dalam informasi, rakyat akan dapat mengolah dan menganalisis informasi menjadi pengetahuan yang dibutuhkan. Demikian kira-kira logika sederhana kedua elemen tadi mendorong keberadaan rakyat. Ketika rakyat berdaya, maka rakyat akan lebih mudah menentukan langkah dan strategi peningkatan kesejahteraan mereka.

Satu hal yang dapat diambil pelajaran penting dari uraian pengalaman pihak-pihak di atas adalah jika wadah pengelolaan akses TIK benar-benar berangkat dari kebutuhan rakyat dengan dilandasi oleh ukuran-ukuran yang disepakati oleh rakyat itu sendiri memberikan peluang berkembangnya sarana TIK tersebut akan lebih sustain dibanding yang tak mengindahkan prasyarat tersebut. Hampir semua sarana yang diuraikan di atas memenuhi uraian mengenai informasi dan komunikasi yang diutarakan oleh Bartle. Namun yang lebih penting untuk dilihat lebih jauh adalah apakah sarana tersebut benar-benar dikelola sesuai kemampuan rakyat itu sendiri, sehingga mereka hanya akan terbebani dengan biaya-biaya yang mereka keluarkan berdasarkan keputusan sendiri. Yang juga tak kalah penting, terbangunnya pranata sosial dalam kelembagaan sarana itu sendiri. Menyiapkan rakyat dapat mengelola "telecenter" tak ubahnya proses pengorganisasian secara partisipatif yang banyak dilakukan oleh LSM saat ini.

Pengalaman program Desa Berdering mengindikasikan tak adanya pranata sosial yang

disiapkan terlebih dahulu. Perangkat komunikasi datang tanpa ada persiapan. Lebih buruk dari itu, keberadaan perangkat tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dan hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Dalam kasus telecenter UNDP – Bappenas, persiapan lebih banyak dikerjakan oleh pihak Pemerintah Daerah melalui tender-tender dengan prosedur pengadaan layaknya barang Pemerintah. Pada beberapa kasus, telecenter hadir dalam posisi sudah siap untuk dioperasikan. Rakyat tak merasa punya kepentingan untuk berada dalam telecenter tersebut. Salah satu cara untuk mengukur secara sederhana adalah berapa pengunjung yang datang dan memanfaatkan telecenter untuk kepentingannya. Kasus telecenter Muneng menurut hasil observasi tim Combine ketika hadir di sana tidak cukup banyak warga ataupun kelompok orang yang memanfaatkan kantor tersebut. Meskipun demikian di satu sisi keberhasilan yang disampaikan dalam website di telecenter Semeru patut juga untuk diperhitungkan.

Kasus pada beberapa radio komunitas yang disampaikan pengalamannya dalam uraian terdahulu, menempatkan pentingnya pranata sosial kelembagaan dibangun terlebih dahulu. Membangun pranata sosial kelembagaan dalam konteks pendirian radio komunitas memang umumnya diawali oleh teridentifikasinya kebutuhan. Kebutuhan tersebut lahir dalam upaya pencapaian tujuan ataupun penyelesaian masalah yang terjadi dalam komunitasnya. Radio berdiri bukan menjadi tujuan, tetapi lebih sebagai alat yang dimiliki komunitas untuk pencapaian tujuan atau penyelesaian masalah sekalipun. Tak jauh berbeda, menempatkan telecenter ataupun TIK dalam posisi yang sama dengan radio komunitas di awal mula berdirinya.

Tulisan ini sesungguhnya tidak bermaksud memberikan penilaian baik atau buruknya sebuah proses penyediaan sarana TIK untuk kepentingan rakyat, namun lebih untuk memperlihatkan berbagai alternatif

pendekatan yang bisa jadi sesuai di satu tempat, namun belum tentu sesuai dengan tempat yang lain. Pada skala makro, kesenjangan digital yang dibahas di awal tulisan ini dapat terfasilitasi dengan inisiatif-inisiatif yang telah dijelaskan dalam tulisan ini. Namun pemenuhan kebutuhan TIK untuk mengatasi kesenjangan digital saja tak cukup. Karena jika yang terjadi hanya demikian, maka tak ubahnya pendekatan yang digunakan menjadi sangat technology driven.

Pelajaran pertama yang harus digarisbawahi – seperti juga yang disimpulkan dalam tulisan Anita Kelles-Viitanen adalah TIK tidak pernah menawarkan solusi, namun lebih menawarkan alat dan aplikasi. Alat dan aplikasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan dalam indikator-indikator perkembangan sosial ekonomi pada umumnya. Alat dan aplikasi TIK dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang lebih mendorong terjadinya pemerataan karena terdistribusinya informasi kepada kelompok-kelompok miskin. Juga misalnya, dengan alat dan aplikasi TIK informasi mengenai pembangunan infrastruktur, program kesehatan, kegiatan pendidikan dapat juga diakses oleh kelompok-kelompok miskin, sehingga bobot pembangunan sektoral tersebut menjadi proses pembangunan sosial ekonomi yang lebih meluas distribusinya.

Pelajaran kedua dalam menerapkan perluasan pengembangan TIK bagi rakyat miskin dan kelompok marginal adalah pembangunan pranata sosial yang harus disiapkan terlebih dahulu agar akseptabilitas rakyat menjadi terbangun. Dalam kasus pengalaman radio komunitas diberbagai tempat, akseptabilitas terbangun karena memang rakyat telah lebih dahulu menerima keberadaan radio komunitas sebagai bagian dari alat perjuangan mereka sehari-hari. Memang jika kemudian kita semua mempertanyakan apa ukuran sebuah keberhasilan penyediaan TIK dalam

upaya pengurangan kemiskinan, nampaknya belum ada alat ukur apapun yang dapat menjustifikasi keberhasilan ataupun kegagalan dari satu aktivitas penyediaan TIK, kecuali alat ukur yang bersifat jangka panjang (outcome), yakni akankah terjadi perubahan dalam ketidakadilan, distribusi ekonomi yang tidak merata, layanan publik yang tidak diskriminatif dan sebagainya.

Paling tidak yang dapat diukur dalam jangka pendek adalah tingkat akseptabilitas rakyat terhadap TIK itu sendiri sebagai bagian dari delivery atas alat dan aplikasi. Akseptabilitas tersebut dapat juga terbangun jika pendekatan yang digunakan tak hanya technology driven semata, tetapi juga memperhatikan bagaimana TIK dapat merespon kebutuhan kelompok miskin ini didalam konteks isi, bahasa, desain maupun harga (biaya).

Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana pelajaran-pelajaran ini dapat teraplikasi dalam program-program yang dikembangkan, baik

oleh Pemerintah, pihak swasta maupun kelompok masyarakat sipil. Atau dengan kata lain, bagaimana proses scaling-up dapat terjadi? Jika pendekatan minimalisasi kesenjangan digital semata, maka program desa berdering barangkali sudah cukup. Namun jika pemanfaatan TIK ingin dijadikan alat dan diaplikasikan bagi upaya pengurangan kemiskinan, maka berbagai strategi perlu dikembangkan. Pertama, karena TIK akan ditempatkan sebagai alat, maka wadah bagi penempatan alat perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Wadah dibangun berdasarkan kebutuhan dan diawali dengan memetakan kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Menyesuaikan wadah dengan konteks serta kebutuhan lokal merupakan hal utama yang harus didahulukan. Sehingga bisa saja terjadi wadah atau lembaga pengelola TIK dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Atau bahkan terkadang pada banyak kasus pengembangan kelembagaan radio komunitas tidak memerlukan adanya kelembagaan yang baru, namun cukup merevitalisasi kelembagaan yang telah ada. Yang penting dipastikan adalah adanya peran-peran yang dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan sebagai lembaga pengelola TIK. Lalu bagaimana misalnya untuk ka-

rus program Desa Berdering, apakah cukup bermanfaat membuat pranata kelembagaan bagi pengelolaan telepon publik. Bisa jadi tidak diperlukan adanya kelembagaan khusus, namun bagaimana telpon tersebut diposisikan dalam satu tempat, dengan kejelasan berbagai aturan penggunaannya.

Kedua, kombinasi antara technology driven dengan social driven mutlak menjadi penting untuk dikembangkan sebagai strategi berikutnya. Pemanfaatan TIK tak hanya berdiri sendiri sebagai sebuah proses kegiatan ekonomi ataupun proses komunikasi dan mengakses informasi, tetapi juga sebagai bagian dari proses transformasi sosial rakyat. Kombinasi ini juga ingin memastikan keberlanjutan proses yang tengah dijalankan. Dari sisi pemanfaatan TIK dilihat sebagai technology driven, sementara dari pranata kelembagaan sosialnya dipandang sebagai social driven.

Bagian akhir tulisan ini adalah refleksi atas tujuan dan capaian intervensi TIK yang diterjemahkan dalam bentuk pertayaan sederhana guna melihat capaian akhir dari pemanfaatan TIK untuk pengurangan kemiskinan. Bisa jadi kita akan memberikan seribu satu argumen untuk mengatakan bahwa jika melalui segala proses yang dijalankan, maka efektivitas pemanfaatan TIK akan meningkat.

Namun untuk mengukur ketercapaian target akhir yakni apakah pengurangan kemiskinan dapat tercapai masih diperlukan prasyarat-prasyarat bagi implementasi pemanfaatan TIK. Belajar dari banyak kasus lainnya, catatan penting dalam pemanfaatan TIK yang harus diwaspadai adalah jika pemanfaatan TIK kemudian hanya sekedar diukur oleh angka-angka kuantitatif semata, tanpa melihat ketercapaian dari sisi kualitatifnya.

